

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI dan Pusat Bangun IPAL Rp 14 Triliun

JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta akan membangun Jakarta Sewerage System (JSS) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada 2020.

IPAL senilai Rp14,47 triliun itu akan dibangun dengan menggunakan anggaran APBN melalui bantuan Pemerintah Jepang dan APBD DKI Jakarta. Untuk konstruksi IPAL zona I rencananya akan dibangun di kawasan Pluit, nilai investasinya mencapai Rp9,87 triliun, termasuk jaringan perpipaan dengan sistem interseptor. Dari total kebutuhan dana, nanti Rp7,7 triliun berasal dari Kementerian PUPR dan Rp2,17 triliun dari APBD DKI. IPAL zona I akan dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektare dengan kapasitas sebesar 240.000 meter kubik per hari untuk melayani 220.000 sambungan rumah (SR) atau 989.389 jiwa.

Cakupan layanannya meliputi 41 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Menteng, Tanah Abang, Gambir, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Pademangan, dan Penjaringan. Saat ini telah diselesaikan Detail Engineering Design (DED). Zona enam akan dibangun IPAL di kawasan Duri Kosambi dengan kapasitas 282.500 meter kubik per hari menggunakan teknologi pengolahan A2O yang dikombinasikan dengan Integrated Fixbed Film Activated Sludge (IFAS).

Target penerima manfaat sebanyak 180.800 jiwa di dua kecamatan di Jakarta Pusat, yakni Gambir dan Tanah Abang, serta delapan kecamatan di Jakarta Barat yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, Kembangan, Tambora, dan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan dan Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara. Kebutuhan bina-

ya pembangunan IPAL zona enam diperkirakan sebesar Rp4,6 triliun berasal dari Kementerian PUPR, bantuan luar negeri (BLN) sebesar Rp3,75 triliun, dan Rp0,85 triliun dari APBD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini mengatakan, pembangunan IPAL merupakan hal yang mendesak bagi warga Ibu Kota. Selain untuk mengantisipasi ancaman kekeringan, pengelolaan air limbah juga bisa menjaga ekosistem kali, sungai, maupun waduk. "Pengelolaan air limbah selama ini baru sekitar 25%. IPAL nanti bisa menjadi sumber air bersih yang saat ini baru melayani 60% kebutuhan air bersih," kata Juaini kemarin.

Dia menjelaskan, sedikitnya ada delapan zona yang akan dibangun mulai tahun depan dan selesai pada 2022. Lima zona tersebut akan dibangun Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PUPR. Lima zona tersebut adalah zona satu, dua, lima, enam, dan delapan.

Sementara tiga zona lain dibangun melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), yaitu zona tiga, empat, dan tujuh. "Dari lima zona yang akan dibangun DKI, dua di antaranya yakni zona satu dan enam dibantu oleh Kementerian PUPR," ujarnya.

Dai menegaskan, pembangunan JSS membutuhkan dana yang sangat besar karena tidak hanya sistem pengolahan air limbahnya, namun pemerintah juga akan membangun jaringan pipa bawah tanah. Nanti pipa akan disambungkan dengan saluran drainase permu-

kiman warga sehingga limbah domestik bisa mengalir ke lokasi JSS untuk dikelola menjadi air bersih. "Karena pembangunannya sangat besar, penganggarnya juga dilakukan bertahap sehingga pengerjaannya dilakukan secara *multi years* (tahun jamak)," ucapnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, selain untuk meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta, pembangunan IPAL juga bertujuan untuk melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik seperti mandi, cuci, kakus, dan aktivitas rumah tangga lain.

Menurut dia, masalah sanitasi bukan semata tentang ketersediaan infrastruktur, namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. "Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) juga masih terjadi di beberapa tempat," kata Basuki.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik berjanji akan mengawasi proses pembangunan IPAL untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari limbah. Menurutnya, pembangunan tersebut harus selesai tepat waktu. "Tidak boleh ada lagi kali yang tercemar setelah ada IPAL," ungkapnya.

● **bima setiyadi**